

**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH TAHUN 2016**

CHOIRUL IKHWAN, Dr. SUSWANTA, M. Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail : Choirul.Ikhwan.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

Infrastruktur jalan mempunyai fungsi yang begitu penting dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi rakyat dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, baik untuk penyaluran barang maupun jasa bagi kehidupan masyarakat. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dinas pekerjaan umum dalam pembangunan jalan daerah dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian pengetahuan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalan daerah dan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi perangkat daerah yang baik dan sesuai aturan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini mendapatkan hasil dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalan daerah berdasarkan wawancara dengan menggunakan indikator kinerja yaitu, produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik dan sesuai keinginan. Dari masing-masing indikator kinerja tersebut sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dengan baik dan benar. Hanya saja pada indikator kualitas pelayanan dinas pekerjaan umum dalam melakukan pembangunan jalan dari tanah ke aspal berjalan lamban. Hal ini yang menyebabkan jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju ke Kecamatan Kotawaringin Lama mudah rusak apabila dilalui kendaraan roda 6 atau yang bermuatan lebih. Harapannya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat lebih serius dan cepat dalam menangani pembangunan jalan dari Kotawaringin Barat menuju Kotawaringin Lama. Karena jalan ini merupakan salah satu akses untuk mensejahterakan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya, meningkatkan perekonomian Daerah, dan memudahkan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja, Pembangunan, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatnya perekonomian suatu Negara maupun Kota. Apabila Infrastruktur Jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama baik, maka akan maju suatu perekonomian sebuah Kota, namun apabila Infrastruktur ini tidak baik, maka perekonomian pun akan berdampak pula tidak baik. Tersedianya akses transportasi yang layak dan baik sangat berperan untuk lancarnya arus lalu lintas. Meningkatnya perkembangan lalu lintas akibat pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan permasalahan yang signifikan jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas dari Infrastruktur jalan yang tersedia. Pertumbuhan transportasi yang sangat pesat berpengaruh pada padatnya lalu lintas, sehingga diperlukan adanya perbaikan jalan yang menunjang pada tingkat kualitas yang baik dan berstandar. Infrastruktur jalan juga mempunyai fungsi yang begitu penting dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi rakyat dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, baik untuk penyaluran barang maupun jasa. Adanya akses jalan yang bagus sangat berperan terhadap kemudahan dalam berlalu lintas. Membahas tentang pembangunan Infrastruktur, memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya untuk membuka batas-batas wilayah, memudahkan jalur dibidang ekonomi, sosial budaya namun untuk meningkatkan kemudahan menyelesaikan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pelayanan umum. Karena pembangunan Infrastruktur belum dilaksanakan secara penuh, maka usaha pertumbuhan kemakmuran masyarakat di suatu Daerah belum dapat terpenuhi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mendefinisikan Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini bergantung pula pada suatu Kota yang dimana pihak Pemerintah atau yang bersangkutan terhadap Infrastruktur ini peduli akan pentingnya Infrastruktur tersebut untuk kemajuan Kota. Karena pada dasarnya suatu Daerah maju dalam bidang ekonomi, sosial, budaya merupakan faktor dari tersedianya Infrastruktur jalan yang memadai. Apabila Infrastruktur dari Daerah tersebut sangat unggul, maka Daerah semakin maju dan berkembang. Pembangunan suatu Infrastruktur di daerah tak lepas dari peran Pemerintah dan Instansi terkait yang mengelola pembangunan Infrastruktur tersebut dari proses perancangan sampai ke proses pembangunan selesai. Tentu saja Pemerintah maupun Instansi yang mengelola pembangunan Infrastruktur ini terdapat kinerja yang menjadi acuan berhasil atau tidaknya pembangunan infrastruktur tersebut. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tumpuan perubahan dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah, masyarakat menganggap belum berhasil memberi hasil yang besar dalam menumbuhkan kinerja birokrasi. Keadaan seperti ini seharusnya dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah maupun Instansi dalam meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi.

Tetapi permasalahan tersebut bertolak belakang dengan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten

Kotawaringin Barat. Dimana di Kabupaten ini terdapat suatu permasalahan Infrastruktur Jalan yang menghubungkan antara Pusat Kota Kabupaten Kotawaringin Barat dengan salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Kotawaringin Lama yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Padahal akses jalan tersebut begitu sangat penting bagi Masyarakat Kotawaringin Barat untuk menuju ke Kecamatan bahkan juga untuk menuju ke Kabupaten lainnya dan juga sangat penting sebagai jalur perekonomian Kabupaten agar lebih meningkat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini sangat dirugikan oleh masyarakat yang menggunakan jalan antara Kabupaten menuju ke Kecamatan tersebut, karena jalan yang di harapkan dari warga Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai akses menuju ke pusat Kota Kabupaten Kotawaringin Barat ini tidak kunjung selesai pembangunannya sejak dimulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2017. Jalan ini sempat selesai dan sempat juga dilalui oleh warga Kabupaten Kotawaringin Barat maupun warga Kecamatan Kotawaringin Lama.

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Kotawaringin Lama yang menggunakan jalan tersebut mengharap pihak yang memang mengurus pembangunan jalan ini dapat secepatnya di selesaikan agar masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut. Pembangunan Infrastruktur ini juga berhubungan dengan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani di bidang infrastruktur dan relasi antara Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Dimana peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting dalam pembangunan Infrastruktur untuk mensejahterakan warga yang menggunakan Infrastruktur ini dan penting bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri. Dan apabila sudah tersambung maka banyak sekali efek positifnya terhadap masyarakat utamanya masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) akan lebih maju pesat. Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menjadikan Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai Kecamatan tertua di Kabupaten Kotawaringin Barat akan terwujud dengan tujuan wisata religinya (Ujang Iskandar, 2014).

Namun sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri belum mencapai tujuan organisasi tersebut yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri yang mana Infrastruktur tersebut tidak kunjung usai sampai saat ini. Bahkan H.Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah menanggapi dengan serius, menekankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mundur dari jabatannya jika tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan Trans Kotawaringin Barat-Kotawaringin Lama tersebut. Pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan upaya untuk mempercepat pembangunan tersebut dengan menaikkan status jalan ke Provinsi (Maman W, 2017). Bahkan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat juga berharap status jalan tersebut meningkat menjadi jalan Provinsi. Pengajuan peningkatan status jalan Kabupaten Kotawaringin Barat-Kecamatan Kotawaringin Lama ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah ikut membantu perbaikan jalan. Sebab, jika status jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama beralih menjadi Jalan Provinsi, maka kewenangan perbaikan jalan tersebut juga berada di Pemerintah Provinsi Kalteng. Selain untuk menambah anggaran perbaikan jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menilai peningkatan status jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama mendesak untuk dilakukan karena jalan tersebut juga menjadi jalan penghubung antara Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kabupaten Sukamara (Hidayat, 2017).

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah tentang bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan Infrastruktur jalan Daerah Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan selain untuk penilaian terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, juga bertujuan sebagai evaluasi terhadap organisasi publik lainnya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam karya tulis ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Disini peneliti ingin mencoba untuk menjelaskan, menggambarkan, dan memberikan pandangan secara jelas tentang permasalahan yang ingin diteliti, yaitu Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun 2016. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi pada penelitian ini ingin fokus pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama dan jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju ke Kecamatan Kotawaringin Lama. Teknik pengumpulan data ini ingin menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk memenuhi data yang dibutuhkan peneliti, maka sasaran dalam wawancara ini adalah Kepala Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Kecamatan Kotawaringin Lama dan informan yang memiliki informasi data lengkap yang dibutuhkan oleh penulis.

Kemudian untuk dokumentasi peneliti ingin menggunakan dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lakip Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016. Dan terakhir peneliti ingin melakukan observasi, peneliti ingin mengamati keadaan jalan yang belum selesai tersebut, dan ingin mengamati kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menangani pembangunan infrastruktur jalan yang ingin diteliti oleh peneliti.

KERANGKA DASAR TEORI

KINERJA

Kinerja di artikan menurut Pasolong (2010:175) konsep kinerja terbagi menjadi dua bagian, kinerja perseorangan dan kinerja organisasi. Kinerja perseorangan adalah hasil kegiatan individu perseorangan tersebut dalam berorganisasi. Sedangkan menurut Mahsun (2006:25) Kinerja merupakan suatu uraian untuk meningkatkan program atau kegiatan dalam pencapaian yang dilakukan oleh organisasi dalam memenuhi sasaran, visi, misi, yang telah tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Byars (1984) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari usaha seseorang yang telah tercapai dengan kemampuan yang dimiliki dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Robbins (2001) kinerja merupakan hasil yang diselesaikan oleh seorang pegawai dalam suatu pekerjaan tertentu. Hasil yang dimaksud merupakan sejauh mana seorang pegawai dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan yang telah diberikan sesuai dengan aturan dan tujuan dari kerja pegawai tersebut. Prawirosento dalam Sinambela (2012:5) juga berpendapat, kinerja merupakan nilai kerja yang dapat diraih oleh perseorangan atau kelompok orang dalam suatu organisasi, harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, untuk usaha dalam meraih tujuan dalam berorganisasi harus disetujui, dan tidak melanggar hukum.

PEMBANGUNAN

Menurut Siagian (1998) pembangunan merupakan kegiatan dalam usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dikerjakan secara sadar untuk suatu bangsa, negara, dan pemerintah kearah modern dalam rangka membina bangsa. menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) bahwa pembangunan merupakan rangkaian perubahan menuju kearah yang lebih baik yang dikerjakan secara terencana. Namun menurut Tikson (2005) pembangunan merupakan perubahan dalam ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan secara sadar melalui keputusan dan formasi yang diharapkan. Dalam buku yang ditulis oleh Inu Kencana (2006:96) yang berjudul Ilmu Administrasi Publik mendefinisikan bahwa pembangunan merupakan sebuah perbaikan yang dari suatu situasi nasional ke situasi nasional yang lain dalam rangka menuju ke perubahan yang jauh lebih baik lagi. Sedangkan Sunyoto Usman (2004:5) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas dari sektor Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan sebagai alasan untuk mengejar sebuah kesuksesan oleh public maupun suatu kelompok tertentu.

INFRASTRUKTUR

Pengertian infratraktur menurut Grigg (1988) adalah proses fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sosial maupun ekonomi, seperti menyediakan transportasi, jalan, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur sebagai proses juga merupakan bagian seperti sarana prasarana yang saling

berhubungan. Menurut American Public works Association (Stone, 1974:12), infrastruktur dileaskan sebagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku dalam pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah, tenaga listrik, dalam pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan menurut Moteff (2003), infrastruktur tidak hanya mengurus dalam hal ekonomi maupun sosial, tetapi infrastruktur juga mengurus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan dalam pemerintah. Disini menjelaskan bahwa infrastruktur ini tidak hanya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti masalah sosial dan ekonomi. Tetapi dalam sudut pandang yang lain, infrastruktur juga fokus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan dalam suatu pemerintahan. J'afar M. (2007) mengemukakan infrastruktur memiliki fungsi positif terhadap perkembangan serta pertumbuhan ekonomi jangka pendek dalam menciptakan lapangan kerja konstruksi yang akan mendukung perusahaan disektor terkait. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur mendefinisikan infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016 digunakan dengan beberapa indikator pengukuran kinerja, yaitu dengan menggunakan Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responibilitas, dan Akuntabilitas.

PRODUKTIVITAS

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembangunan infrastruktur jalan dari segi produktivitas dapat dilihat kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan jalan ini sudah baik dan telah memberikan pengeluaran yang besar terhadap masyarakat. Terbukti dengan adanya pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama ini membuka keterisolasian daerah yang mana berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memudahkan aktivitas masyarakat dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin lama atau sebaliknya, dan juga memudahkan Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan apapun yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya ini merupakan suatu hasil yang telah dicapai pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk selalu mensejahterahkan masyarakat dalam bidang apapun. Dan menurut penulis, apa yang telah didapat dari pengeluaran ini adalah suatu cara untuk memajukan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat lebih baik lagi, karena suatu daerah dapat maju tidak terlepas dari infrastruktur yang memadai.

Adapun masukan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan dari pangkalan bun ke kotawaringin lama adalah :

Masukan dalam sasaran Infrastruktur adalah dengan terjaminnya jaringan infrastruktur di seluruh daerah kabupaten untuk memperlancar aksesibilitas masyarakat dan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian. Dan saat ini adalah output yang dihasilkan Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur jalan dari pangkalan bun ke kotawaringin lama :

- a. Terbukanya isolasi daerah sehingga sampai ke kabupaten tetangga maupun ke provinsi kalimantan barat bisa terlayani dengan cara dinas PU membuka jalan yang panjangnya 41km.
- b. Kemudian selain itu tujuannya juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,
- d. Administrasi pemerintahan yang baik,
- e. Pelayanan kepada kependudukan, memudahkan dalam pelayanan sektor barang dan jasa,
- f. Menunjang pergerakan aksesibilitas masyarakat dari pangkalan bun ke kotawaringin lama.

Sumber : LAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Kemudian dalam mencapai hasil yang diinginkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sejak pembangunan jalan pada tahun 2004 sampai Tahun 2018 selalu mengalokasikan dana setiap tahun supaya dalam pembangunan ini berjalan sesuai dengan keinginan. Tentu saja dengan selalu mengalokasikan dana setiap tahunnya, berarti pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selalu berupaya terus agar pembangunan jalan ini selalu berjalan dan membuktikan jika Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat serius dalam pembangunan jalan. Berdasarkan observasi penulis, usaha yang dicapai telah dilakukan, terbukti adanya penambahan aspal jalan dan menambal jalan yang sering berlumpur apabila hujan turun. Dan juga salah satu usaha yang telah dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu melakukan pembangunan dengan metode multi yes untuk jembatan layang yang notabene keadaannya merupakan danau. Dan berdasarkan observasi lapangan, jembatan layang ini sudah terbangun sepanjang 2 km dan rencananya pada tahun 2018 ini akan ditambah panjang jembatan layang sepanjang 3 km yang tentu dampaknya sangat bermanfaat untuk menghindari jalan sekitar jembatan yang masih terkena banjir. Juga sudah terealisasinya sebagian jalan yang beraspal agar masyarakat bisa dapat menggunakan jalan tersebut. Tentu saja dalam pandangan penulis, usaha yang telah dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengolah jalan supaya selalu fungsional dilalui masyarakat sudah sangat baik dan efektif demi tercapainya pembangunan jalan sesuai yang diinginkan.

KUALITAS PELAYANAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dalam pembangunan infrastruktur jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama, dapat dikatakan kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dari segi aspek kualitas pelayanan sudah cukup baik. Terbukti dengan adanya pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat meningkatkan kondisi jalan dengan cara melakukan pembangunan jalan terus menerus dari tahun 2011 sampai 2016 untuk membuat kondisi jalan lebih baik. Dapat dilihat pada fokus proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, peningkatannya sangat signifikan. Yang pada periode tahun 2011 persentasenya hanya 0,13% , dan pada tahun 2016 akhir periode RPJMD meningkat menjadi 0,27%. Kemudian untuk fokus pada panjang jalan dilalui roda 4 yang dihitung dengan menggunakan kilometer, pada awal periode tahun 2011 hanya 2.405,00 km saja, dan pada akhir periode RPJMD tahun 2016 meningkat menjadi 2.650,00 km. Tentu saja ini merupakan usaha yang selalu dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jalan agar masyarakat mudah menggunakan jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun bukti pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan pelayanan jalan dalam kondisi baik seperti tabel di bawah :

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Pelayanan Umum
Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Bidang
Bina Marga Tahun 2016

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2011	Taerget Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2016
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	0,13	0,14	0,18	0,21	0,24	0,27	0,27
2	Rasio Jaringan dalam Kondisi Baik	0,52	0,57	0,62	0,67	0,73	0,79	0,79
3	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	93,82	93,82	94,81	95,79	96,78	97,79	97,79

4	Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8
5	Rasio Tempat Pembuangan Sampah	2,32	2,32	4,2	5,2	6,2	7,5	7,5
6	Rasio Rumah Layak Huni	0,59	0,60	0,61	0,63	0,64	0,65	0,65
7	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
8	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (km)	2.405,26	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Kemudian adanya pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemeliharaan jalan tiap tahun yang mana pemeliharaan ini bertujuan untuk membuat jalan terus fungsional di gunakan masyarakat dan tentunya sangat berperan penting bagi kelancaran masyarakat melalui jalan tersebut dalam melakukan segala aktifitasnya. Juga dengan adanya ketanggapan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menurunkan personilnya ketika jalan sedang rusak, sangat membantu masyarakat apabila ada suatu kendala yang dirasakan masyarakat ketika melalui jalan tersebut dan masyarakat merasa terlayani dengan baik oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun usaha yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk membuat jalan yang berlubang atau rusak tersebut menjadi fungsional untuk masyarakat yang melaluinya, seperti foto dibawah ini :

Gambar 3

Pelayanan Yang Diberikan Dinas Pekerjaan Umum Untuk Masyarakat Dalam Memperbaiki Jalan Yang Rusak



Sumber : Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari foto diatas merupakan salah satu usaha Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melayani masyarakat agar jalan dapat selalu fungsional. Terbukti Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selalu mengupayakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan perbaikan jalan untuk membuat masyarakat terlayani dengan adanya perbaikan jalan yang rusak dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju ke Kecamatan Kotawaringin Barat. Hanya saja menurut penulis, usaha Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengerasan jalan dari tanah ke aspal sedikit lamban, bertahap dari tahun ke tahun itu tidak merata pengaspalannya yang membuat jalan dengan mudah rusak apabila turun hujan dan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Barat ini akan lebih lama lagi waktunya. Tentu saja hal ini membuat pembangunan jalan menjadi lamban, karena jalan yang masih berbahan tanah akan rusak kembali apabila hujan turun dan dilalui kendaraan berbeban melebihi batas maksimal.

RESPONSIVITAS

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan responsivitas menganggap dengan adanya media massa dalam proses pembangunan jalan ini sangat berperan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena dari media massa, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menjadi tau apasaja yang di inginkan masyarakat untuk pembangunan ini dan keluhan masyarakat ketika jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama rusak. Tentu saja ini sangat baik, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi lebih tanggap. Dapat dilihat kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selalu tanggap apabila ketika ada kritikan dari masyarakat terhadap jalan yang rusak, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang langsung menurunkan alat berat, mengirimkan material untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Tentu saja dengan kegiatan yang tanggap ini membuat masyarakat merasa puas ketika kritikan mereka langsung di respon dengan cepat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barat dalam upaya menyelesaikan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama. Kemudian dalam menanggapi keluhan masyarakat apabila ada kendaraan roda 6 atau lebih yang melalui jalan tersebut membuat jalan menjadi rusak. Hal ini terbukti dengan adanya pemasangan portal dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di bagian jalan dari arah Pangkalan Bun dan bagian jalan dari arah Kotawaringin Lama. Yang mana dengan memasang portal dapat membuat kendaraan roda 6 atau lebih tidak bisa melalui portalnya yang memilik kapasitas tinngi kendaraan yang boleh dilalui. Dan juga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang memasang rambu atau papan pemberitahuan kalau kendaraan tersebut tidak boleh melewati jalan yang masih dalam tahap pemeliharaan.

RESPONBILITAS

Responbilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat ialah dalam pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Tentu saja dalam hal ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melakukan kegiatan pembangunan jalan dilakukan secara terarah dan fokus kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di inginkan. Terbukti setelah adanya jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama, masyarakat lebih mudah untuk melakukan segala kegiatan. Melihat dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa.

Adapun sasaran yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 adalah :

Tabel 3.2

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan

Sasaran	IKU	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,27	0,45	166,67

Sumber : Lakip Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan mengikuti ketentuan yang berlaku. Yang mana ketentuan ini merupakan petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini tentunya dapat membuat pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melakukan kegiatan pembangunan secara tersusun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang infrastruktur. Dan dalam pembangunan infrastruktur jalan ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan pembangunan sesuai prosedur petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Yang mana prosedur ini menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan secara terarah dan tidak sembarangan asal jadi saja. Hal ini tentunya dapat membuat pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melakukan kegiatan pembangunan secara tersusun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang infrastruktur.

Adapun pelaksanaan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang metoda pelaksanaan sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya;
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.

Dalam Pekerjaan pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama berpedoman pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Kegiatan pemeliharaan berkala, meliputi jenis pekerjaan:

A. Pada panjang efektif:

- a. Perbaikan permukaan perkerasan (lubang, retak amblas, dll);
- b. Pembentukan/ Pelapisan ulang permukaan perkerasan (agregat, campuran aspal);
- c. Perbaikan permukaan bahu jalan (penambahan material dan pemadatan/perataan);
- d. Pembuatan/Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong gorong;
- e. Penggantian, rambu/perlengkapan jalan.

B. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

Kemudian dalam Pekerjaan peningkatan jalan, Dinas Pekerjaan Umum juga telah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama berupa peningkatan/perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal. Adapun kegiatan peningkatan jalan tersebut meliputi:

A. Pada panjang efektif :

- a. Perbaikan permukaan perkerasan (Lubang, retak, amblas, dll);
- b. Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- c. Pelapisan permukaan aspal;
- d. Penambahan material bahu jalan dan pemadatan atau menyesuaikan permukaan perkerasan;
- e. Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong gorong;
- f. Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan;
- g. Penggantian, perbaikan atau pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkapan jalan.

B. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

Pada peningkatan jalan berupa pelebaran, jenis pekerjaannya meliputi:

A. Pada daerah pelebaran :

- a. Persiapan tanah dasar/subgrade (galian / timbunan tanah / material dan pembentukan / pemadatan);
- b. Perataan atau leveling perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- c. Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

B. Pada daerah perkerasan lama :

- a. Perbaikan permukaan perkerasan (lubang,retak,amblas, dll);
- b. Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- c. Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

C. Pada daerah diluar perkerasan :

- a. Penambahan material bahu jalan dan pemadatan atau penyesuaian pelebaran perkerasan;
- b. Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- c. Pemotongan rumput dan pembersihan ruang milik jalan;
- d. Penggantian, perbaikan atau pembersihan dan pengecatan rambu atau perlengkapan jalan.

AKUNTABILITAS

^ Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam segi pertanggung jawaban dengan di awasi oleh pihak internal dan eksternal seperti Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setiap tahunnya. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sangat terjamin karena selalu memberikan laporan kepada pihak pengawas. Tentu saja hal ini dapat membuat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur jalan jauh lebih baik. Hal ini dibuktikan telah adanya usaha dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempublikasikan dokumen-dokumen yang dapat dilihat oleh masyarakat, memperlihatkan proses lelang di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, dan memasang papan informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk melaksanakan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama ini. Dan menurut pandangan penulis, hal ini sangat baik, karena untuk memberikan informasi dan keterbukaan antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dengan masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama.

Kemudian dari segi tanggung jawab, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sangat baik. Karena telah dibuktikan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Setiap tahun membuat laporan penyampaian aset, penyampaian kinerja, itu dituangkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan dituangkan didalam ketentuan adanya laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sangat terjamin karena selalu memberikan laporan kepada pihak pengawas. Tentu saja hal ini dapat membuat kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan jauh lebih baik.

Adapun laporan pertanggung jawaban yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama setiap tahun nya yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 :

Perbandingan capaian kinerja sejak tahun 2012 dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di tahun 2016 :

Tabel 3.3

Perbandingan capaian kinerja sejak tahun 2012 dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Dinas Pekerjaan Umum di tahun 2016

Sasaran	IKU	Capaian Kinerja (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	97,5 8	54,7 8	94,8 2	185,7 3	166,6 7

Sumber : LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotawaringin Barat Tahun

2016

Capaian kinerja tahun 2012 sampai 2014 selalu dibawah target yang direncanakan namun mulai tahun 2015 dan 2016 melebihi target yang telah direncanakan dalam rencana strategis (Renstra SKPD). Pada tahun 2016 pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.217.165.622.286,- dengan realisasi anggaran Rp. 216.471.989.610,- (99,68%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 4 kegiatan yaitu pembangunan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan jalan, dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman. Pembangunan jalan pada tahun 2016 ditargetkan 24 paket dan secara keseluruhan terealisasi 100%. Melalui program ini juga telah dilaksanakan pembangunan jembatan sebanyak 20 paket, peningkatan jalan 18 paket dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman sebanyak 110 paket. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 693.632.676,- atau 0,32%.
- b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.745.512.350,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.738.635.250,- (99,75%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. Program ini dimaksudkan untuk menangani pemeliharaan jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan. Pemeliharaan tersebut berupa pemeliharaan yang dilakukan secara rutin maupun periodik meliputi pemeliharaan jalan 3 paket dan pemeliharaan jembatan 6 paket. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 6.877.100,- atau 0,25%.
- c. Program penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.146.098.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 145.178.000,- (99,37%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu penyusunan sistem informasi/data base jalan dan penyusunan sistem informasi/data base jembatan. Output dari program ini berupa penyediaan dokumen hasil survey kondisi jalan dan jembatan yang mana dokumen tersebut menjadi data base guna menunjang perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 9220.000,- atau 0,63%.
- d. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.6.599.497.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.573.636.100,- (99,60%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan serta peningkatan jalan perdesaan. Melalui program ini telah direalisasikan rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan 8 paket, dan peningkatan jalan perdesaan 18 paket. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 37.242.800,- atau 0,54%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan infrastruktur jalan daerah tahun 2016 dengan menggunakan lima indikator kinerja yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sudah lumayan baik. Berdasarkan dari

Segi Produkivitas sudah baik karena Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuka keterisolasian daerah dan selalu menganggarkan dan setiap tahunnya untuk pembangunan jalan. Tentu saja hal ini sangat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten Kotawaringin Barat dan agar kegiatan pembangunan jalan tersebut segera selesai. Segi Kualitas Pelayanan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya pelayanan dalam peningkatan kondisi jalan terus menerus setiap tahunnya menjadi lebih baik. Tentu saja apa yang telah di lakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan bentuk keseriusan dalam melayani masyarakat untuk lebih nyaman ketika menggunakan jalan daerah. Namun dalam kegiatan meningkatkan kondisi jalan dari tanah menjadi aspal disepanjang jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama tidak merata dan lamban..

Segi Responsivitas, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memenuhi dan merespon keinginan masyarakat sudah sangat baik. Hal ini terbukti ketika masyarakat mengeluhkan jalan yang rusak dan tidak dapat dilalui, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang langsung tanggap untuk melakukan tindakan agar jalan tersebut dapat dilalui. Segi Responbilitas yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan pembangunan jalan dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku sudah sangat baik. Dapat dilihat dari pembangunan jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Barat yang dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang infrastruktur jalan. Segi Akuntabilitas sudah baik dan maksimal. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat dari laporan yang setiap tahun selalu di berikan kepada pihak pengawas internal dan eksternal agar segala kegiatan dalam pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama selalu terawasi. Dan transparansi antara pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap masyarakat sudah sangat baik. Dengan adanya bentuk transparansi ini tentunya membuat masyarakat merasa tidak ada hal-hal yang di tutupi dari kegiatan pembangunan jalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kencana, I. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan manajemen pegawai negeri sipil*. Refika Aditama.
- Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2013). *Etika Pembangunan*. Pringwulung: Caps Publishing.

Jurnal

- Adianto, M. (2013). *Analisis Kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Dengan Pendekatan Balance Scorecard*. Doctoral dissertation, Universitas Terbuka.
- Ardhana, N. S. (2014). Efektifitas Pasal 13 Jo Pasal 14 Huruf (D) Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Surabaya. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1.2*.
- Astono, J. D. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Karwayan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Sains Manajemen , Volume 2*.
- Astunik, W. (2015). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan*. Bandar Lampung: Doctoral dissertation FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK.
- Asudin, A. (2012). Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. *SMARTek , 293*.
- Azhari, A., & Majid, I. A. (2014). *Faktor–Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kinerja Kontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Di Kabupaten Aceh Jaya*. *Jurnal Teknik Sipil Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 3.1*.
- Chitrasari, N. (2012). *Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Cilegon*. Serang: Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Christin Dessy Sahudege, B. K. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi

- Masyarakat Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik* , 4. 32.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Iek, M. (2013). Analisa Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman May Barat Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* , 6.1.
- Kurniati, Y. I. (2012). *Analisis Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah Pada Kantor Camat Labuhan Badas Kecamatan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Dotoral Dissertation, Universitas Terbuka.
- Linda Utami, R. S. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. *Jurnal Praktik Bisnis* , Volume 4, Nomor 1.
- Musaddad, I. (2016). Produktivitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Pada Tahun 2015).
- Nur, F., Bulkis, S., & Naping, H. (2010). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa*. Doctoral dissertaion, Universitas Hasanudin
- Permana, R. A. (2010). *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Prasarana Daerah Di Kabupaten Purworejo Tahun 2006-2008*. Yogyakarta: Skripsi UMY.
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , 5.
- Rahman, O. (2016). *Persepsi Politik Etnis*. Yogyakarta.
- Riny. (2016). Kinerja Aparatur Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis* , 4. 2.
- Rozi, B., Nugroho, K. S., & Jumiati, I. E. (2016). *Penerapan Prinsi-Prinsip Good Governance Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten* Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Santoso, D. (2017). *Kinerja Aparatur Pemerintah Di Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat*. Semarang: Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Syaiin, S. (2008). *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Klinik Spesialis Bestari Medan Tahun 2007*. Medan: Doctoral Disertation.
- Widiaswari, R. R. (2016). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Banjar Baru. *JURNAL SPREAD* , Volume 2 Nomor 3.

Yohanes F.C. Ransun, F. K. (2017). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah. *Jurnal Eksekutif*, 3-6.

Zudia, M. (2010). *Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard Pada PT Bank Jateng Semarang*. Semarang: Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.

Internet

Dzakwan, S. (08 Maret 2017). *Jalan Kotawaringin Lama Jadi Bubur, Transportasi Dan Ekonomi Warga Lumpuh*. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2017/03/08/340/1637052/> pada tanggal 23 November 2017 pukul 20.20 WIB

Hidayat. (13 Desember 2016). *Anggaran Minim, Dinas PU Ajukan Peningkatan Status Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama*. Diakses melalui <http://www.menaranews.com/2016/12/> pada tanggal 23 November 2017 pukul 21.40 WIB.

Maman, W. (30 Januari 2017). *Tidak Bisa Selesaikan Jalan Pangkalan Bun – Kolam, Kadis PU Lebih Baik Mundur*. Diakses melalui <https://beritasampit.co.id/2017/01/30/> pada tanggal 23 November 2017 pukul 16.45 WIB

<https://kobarkab.bps.go.id/> di akses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 18.40 WIB

Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 38 Pasal 5 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/PRT/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Sumber Lain :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.